

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP “POLISI CEPEK” DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dini Hariyanti

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

dinihariyanti@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada pasal 6 ayat (1), melarang setiap orang dan atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar balik arah. Pada kenyataannya di Kota Surabaya hal tersebut menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebut dengan “Polisi Cepek”, untuk mengatur lalu lintas di jalan tanpa memiliki kewenangan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta (2) menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya tidak berjalan sesuai peraturan serta standar operasional prosedur yang ada. Adapun kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya antara lain adalah ketidakjelasan perundang-undangan yang mengatur, penegak hukum yang tidak menjalankan sanksi sebagaimana seharusnya serta sikap masyarakat sendiri yang tidak taat hukum.

Kata Kunci: “Polisi Cepek”, Penegakan Hukum, Kendala

Abstract

Regional Regulation of Surabaya City Number 2 of 2014 concerning the Implementation of Public Peace and Order in article 6 paragraph (1), prohibits anyone and / or groups who do not have the authority to regulate traffic at crossroads, bends, or reverse directions. In fact, in the city of Surabaya this is a job done by some people called “Polisi Cepek”, to regulate traffic on the road without having authority.

The purpose of this study is (1) to find out how law enforcement against the existence of “Polisi Cepek” in the city of Surabaya based on laws and regulations and (2) analyze the constraints in law enforcement on the existence of “Polisi Cepek” in Surabaya City. This study uses a type of empirical research. Data collection is done through interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analytical.

The results showed that law enforcement on the existence of the "Polisi Cepek" in the city of Surabaya did not work according to the existing regulations and operational standards of procedures. The constraints in law enforcement efforts against the “Polisi Cepek” in the city of Surabaya include the lack of clarity of legislation governing, law enforcers who do not carry out sanctions as they should and attitudes of the people themselves who do not obey the law.

Keywords: “Polisi Cepek”, Law Enforcement, obstacles

PENDAHULUAN

Indonesia berhasil masuk menjadi nominasi negara dengan rata-rata jam sibuk yang dihabiskan di kemacetan (*Average Peak Hours Spent in Congestion*) kedua di dunia versi INRIX 2017 *Traffic Scorecard* dengan rata-rata 51 jam setelah Thailand (INRIX : 2017). INRIX sendiri adalah perusahaan lembaga riset asal Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam analisis

transportasi. Hal itu tentu sangat mencengangkan ketika Indonesia menjadi 3 (tiga) besar negara termacet di dunia. Kemudian hasil riset selanjutnya menunjukkan beberapa kota termacet di Indonesia antara lain adalah Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Malang, Yogyakarta, Padang, Pontianak dan Tarogong. Kota Surabaya adalah salah satu kota yang mendapat julukan kota termacet di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota

Surabaya mencapai 2.126.168 unit dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 sekitar 2.870.000 orang. Kedua hal tersebut tentu akan berimbas pada kondisi lalu lintas di Kota Surabaya.

Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya yang tipis, tak dipungkiri dapat menyebabkan kemacetan di Kota Surabaya. Pada saat kemacetan tersebut terjadi, dibutuhkan petugas yang siaga untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin memburuk. Petugas dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas. Hal tersebut sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun jumlah petugas yang ada tidak cukup untuk mengakomodasi kemacetan di Kota Surabaya. Kasatreskrim Polresta Surabaya, mengungkapkan bahwa rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk di Kota Surabaya masih kurang ideal, karena idealnya rasio antara polisi dengan masyarakat berbanding 1:575. Khusus di kota besar seperti Surabaya, rasio perbandingan menjadi hanya 1:300. Surabaya yang berpenduduk sekitar 3,1 juta idealnya memiliki 10.597 polisi. Namun jumlah polisi di Kota Surabaya hanya sekitar 3.258 polisi. Saat ini rasio antara polisi dengan masyarakat adalah 1:975. Biasanya polantas hanya mengatur lalu lintas di jalan-jalan protokol saja. Tidak hanya itu, Polisi Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Polantas, terkadang hanya mengatur lalu lintas di pagi dan sore hari, sedangkan pada jam-jam lain yang tidak dapat diprediksi akan terjadi kemacetan, Polantas tidak siap di lokasi untuk mengaturnya.

Keadaan yang terjadi tersebut diatas kemudian dibaca dan ditangkap oleh beberapa orang yang berada di sekitar lokasi kemacetan. Kondisi yang sedemikian rupa dianggap sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan uang sekadarnya sebagai jasa pengatur lalu lintas amatiran. Masyarakat telah biasa menyebutnya sebagai “Polisi Cepek”. Keberadaan “Polisi Cepek” kini telah banyak ditemui di hampir seluruh penjuru kota Surabaya. Istilah “Polisi Cepek” berkembang di masyarakat untuk memberikan julukan kepada orang yang mengatur lalu lintas di jalan namun bukanlah petugas yang berwenang. Istilah tidak baku tersebut diartikan masyarakat sebagai “polisi” yang dalam hal ini dimaksudkan adalah orang yang mengatur lalu lintas serta kata “cepek” yang artinya seratus rupiah. Polisi cepek yang mengatur lalu lintas di jalan kemudian akan diberikan imbalah berupa uang recehan mulai dari Rp 100,- (seratus rupiah) hingga jumlah tertentu yang dikehendaki pengemudi jalan.

Secara umum di Indonesia memang belum terdapat aturan yang mengkhususkan pada larangan terhadap

keberadaan “Polisi Cepek”, namun di beberapa daerah seperti halnya di Kota Surabaya memiliki aturan tentang hal tersebut. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok tanpa kewenangan dilarang untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Adanya “Polisi Cepek” di Kota Surabaya yang jumlahnya tidak dapat ditentukan tentu saja secara jelas telah melanggar peraturan daerah. Atas hal tersebut pelanggarnya dapat dikenai sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum, kepala daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surabaya. Kewenangan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan pada pelanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdapat dalam Pasal 44 perda tersebut yang selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 10 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu berupa teguran lisan dan/atau penertiban. Pemberian sanksi administrasi tersebut dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan/atau Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sedangkan penyidikan terhadap pelanggar yang dapat dikenai sanksi pidana terdapat pada Pasal 46 perda tersebut yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan apa kendala dalam penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya.

METODE

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris (Tinambunan, 2016: 254). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan metode pengolahan data primer, yaitu peroleh data secara langsung dari masyarakat. (Fajar, 2010: 155)

Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya, serta kendala dalam penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan, yaitu Bapak Saiful Ikwan selaku Kepala Seksi Pengawasan Satpol PP Kota Surabaya, Bapak Soesandi Ismawan selaku Kepala Bidang Pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Suef selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya, dan dua “Polisi Cepek” di Jalan Kutisari dan Jalan Dharmawangsa yaitu Bapak Sutrisno dan Bapak Edy, serta dua pengendara kendaraan bermotor di Jalan Kutisari dan Jalan Dharmawangsa yaitu Almira dan Muhammad Iqbal. Dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil penelitian ilmiah, buku-buku atau situs resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada informan. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data yang dapat berupa gambar dan catatan tertulis yang diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa langkah-langkah yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Analisis secara deskriptif analitis yang dimaksudkan adalah pemaparan yang dijelaskan oleh informan baik tulis maupun lisan, sesuai dengan keadaan nyata dan secara menyeluruh dalam rangka untuk dapat menguraikan deskripsi dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu

kesimpulan yang umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan lalu lintas merupakan bentuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi salah satu urusan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

“ Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Operasional dalam bunyi pasal diatas adalah pengelolaan pergerakan dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa salah satu urusan penyelenggaraan lalu lintas adalah pengaturan lalu lintas yang menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya aturan yang mengatur tentang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Lalu Lintas untuk mengatur lalu lintas, menunjukkan bahwa kewenangan untuk mengatur lalu lintas telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Adanya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018, dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan atau Kepala Dinas Perhubungan. Sedangkan dalam hal pengenaan sanksi pidana, akan langsung dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara, penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya yaitu:

1. Dilakukan dengan humanis

Berdasarkan wawancara dengan para penegak hukum terhadap “Polisi Cepek” yang dalam hal ini yaitu Satpol PP serta dinas perhubungan Kota Surabaya,

mengungkapkan bahwa belum pernah dilakukan tindakan secara tegas terhadap pelanggaran atas Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tersebut. Sanksi yang dapat diterapkan pada “Polisi Cepek” di Kota Surabaya sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 adalah berupa teguran lisan dan atau penertiban. Berdasarkan hal tersebut maka, “Polisi Cepek” yang dalam hal ini masuk ke dalam kategori pelanggaran perda dapat diberikan sanksi tersebut.

Bertolak belakang dengan penerapan sanksi pada penjelasan diatas, faktanya para penegak hukum tidak serta merta menerapkan sanksi tersebut kepada “Polisi Cepek” di Kota Surabaya. Selama ini teguran lisan dan atau penertiban hanya pernah dilakukan Satpol PP dan dinas perhubungan pada “Polisi Cepek” yang dilaporkan oleh masyarakat karena dianggap mengganggu. Kedua instansi tersebut memaparkan bahwa penanganan dilakukan secara humanis. Dalam hal ini humanis diartikan dengan upaya pembiaran terhadap “Polisi Cepek” selama apa yang dilakukan tidak mengganggu dan justru cenderung membantu pengendara. Kepala Seksi Pengawasan Satpol PP Kota Surabaya mengungkapkan bahwa saat ini yang sedang menjadi fokus utama penanganan Satpol PP adalah mengenai pedagang liar serta anak-anak. Sama adanya seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Surabaya saat ini sedang berfokus pada penanganan parkir liar. Kedua instansi tersebut juga mengungkapkan keterbatasan personel membuat penanganan terhadap “Polisi Cepek” pun kurang maksimal.

2. Sanksi hanya diterapkan kepada “Polisi Cepek” yang meresahkan berdasarkan laporan dari masyarakat

Penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya yang pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan yaitu dengan cara yang humanis. Namun hal tersebut tidak semerta-merta para penegak hukum melakukan pembiaran terhadap “Polisi Cepek” yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan Satpol PP Kota Surabaya, yang pernah mendapatkan laporan dari masyarakat atas “Polisi Cepek” yang meresahkan karena meminta uang secara paksa di sekitar Taman Lansia Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP kemudian mengambil tindakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yaitu menertibkan “Polisi Cepek” tersebut.

Serupa dengan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang pernah melakukan penertiban terhadap “Polisi Cepek” yang dengan sengaja membuka penghalang jalan (*road barrier*) yang ada di tempat putar balik arah (*u-turn*) di Jalan HR Muhammad Surabaya. “Polisi Cepek” tersebut nekat membuka *road*

barrier yang telah dipasang petugas agar dapat melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi tersebut. Menanggapi hal tersebut kemudian Dinas Perhubungan Kota Surabaya segera mengambil tindakan dengan menertibkan “Polisi Cepek” tersebut. Selain itu dinas perhubungan juga langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini yaitu dinas pekerjaan umum dan bina marga untuk segera menutup tempat putar balik arah tersebut secara permanen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tindakan pemberian sanksi terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya baik oleh Satpol PP maupun dinas perhubungan masih sebatas pada laporan masyarakat. Hal tersebut karena menurut kedua instansi tersebut, “Polisi Cepek” yang kebanyakan adalah warga Kota Surabaya sendiri masih perlu diberikan pembinaan. Selain itu alasan lain yang membuat Satpol PP dan atau dinas perhubungan hanya memberikan sanksi terhadap “Polisi Cepek” berdasarkan laporan dari masyarakat saja, adalah karena kedua instansi tersebut menganggap para “Polisi Cepek” belum mengetahui tentang adanya aturan yang melarang kegiatan mengatur lalu lintas tanpa kewenangan.

Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya

Penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya berkaitan dengan larangan bagi setiap orang untuk mengatur lalu lintas di tempat putar balik arah, persimpangan jalan maupun tikungan jalan bertujuan agar supaya masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan tanpa keahlian maupun pengetahuan untuk mengatur jalan, tidak menyebabkan masalah lain yang dapat timbul karenanya. Apabila orang yang tidak memiliki kewenangan maupun pengetahuan tentang jalan dan lebih berorientasi pada uang, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menyebabkan jalanan semakin macet. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya dikaitkan dengan teori unsur-unsur dalam penegakan hukum pada tabel dibawah ini

Tabel

Unsur-unsur dalam penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya

No.	Unsur-unsur	Terpenuhi	Belum terpenuhi
1	Undang-undang	-	√
2	Penegak hukum	-	√
3	Lingkungan yang meliputi pribadi masyarakat dan sosial	-	√

Sumber : Diolah Sendiri

Berdasarkan gambaran dari tabel diatas, kendala dalam penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya yaitu :

1) Peraturan perundang-undangan yang tidak secara jelas mengatur tentang sanksi yang diterapkan

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan salah satu produk hukum atau peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa daerah yakni walikota Surabaya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah kewajiban daerah dalam desentralisasi untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Adanya Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat ini diatur mengenai larangan bagi setiap warga di Kota Surabaya yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman. Salah satunya dalam pembahasan ini adalah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) perda nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Setiap orang dan atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat putar balik arah.”

Bunyi pasal diatas telah jelas mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Namun pada kenyataannya hal tersebut seakan menjadi sebuah aturan belaka yang tidak ditaati dengan semestinya. Bagi pelanggar pasal tersebut kemudian akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau penertiban. Dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018, sanksi administrasi dapat diberikan oleh kepala dinas perhubungan dan atau kepala Satpol PP. Hal tersebut menandakan bahwa atas pelanggaran khususnya Pasal 6 ayat (1) tersebut sanksi administrasi dapat diberikan oleh kepala Satpol PP maupun kepala dinas perhubungan secara masing-masing atau bersama-sama apabila ditemukan pelanggaran.

Pengenaan sanksi pidana juga diatur bagi pelanggar Pasal 6 ayat (1) perda nomor 2 tahun 2014 tersebut. Ketentuan pidana tersebut memuat pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun pada perda tersebut tidak menyatakan secara jelas mengenai klasifikasi pelanggaran yang nantinya akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Tindakan “Polisi Cepek” yang seperti apa yang akan dikenakan sanksi

pidana. Hal tersebut kemudian membuat sanksi pidana yang ada didalam perda diartikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk memberikan efek jera pada pelanggar.

2) Penegak hukum yang tidak menerapkan sanksi pada “Polisi Cepek” sesuai perundang-undangan.

Proses penegakan hukum dijalankan oleh para aparat penegak hukum yang telah diatur pada masing-masing aturan. Dalam penegakan hukum terhadap sebuah perda atau perkara merupakan tugas dari Satpol PP yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan hukum terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya dalam pembahasan ini yakni pelanggaran atas Pasal 6 ayat (1), berupa pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 yaitu dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dan atau Kepala dinas perhubungan. Mengenai prosedur untuk pemberian sanksi administrasi, baik pihak Satpol PP maupun Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan adalah sama.

Pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau penertiban menurut pihak Satpol PP maupun dinas perhubungan, hingga saat ini hanya diberikan kepada “Polisi Cepek” yang dilaporkan oleh masyarakat karena meresahkan. Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP maupun dinas perhubungan terkait masalah “Polisi Cepek” di Kota Surabaya hanya sebatas pada apa yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Padahal dengan ada atau tidak laporan dari masyarakat pun, “Polisi Cepek” adalah hal yang dilarang, sesuai dengan Pasal 6 (1) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. Menurut pihak Satpol PP maupun dinas perhubungan, “Polisi Cepek” tidak semata-mata ditindak dengan tegas karena kedua instansi tersebut mengedepankan cara yang humanis. Hal tersebut karena, sebagian besar “Polisi Cepek” adalah warga Kota Surabaya dan keberadaannya terkadang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penjelasan diatas memberikan gambaran pada penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” yang tidak tegas karena hanya menindak berdasarkan laporan dari masyarakat, padahal apabila pihak Satpol PP maupun dinas perhubungan menemukan pelanggaran dapat langsung diberikan sanksi berupa teguran lisan dan atau penertiban. Namun faktanya, setelah melakukan wawancara dengan “Polisi Cepek” di Jalan Dharmawangsa maupun Jalan Kutisari, keduanya mengungkapkan belum pernah ditegur maupun ditertibkan oleh Satpol PP dan atau dinas perhubungan, walaupun sering dijumpai patrol Satpol PP maupun dinas

perhubungan di wilayah tersebut. Hal tersebut kemudian yang membuat “Polisi Cepek” tetap bekerja meskipun mengetahui adanya larangan tentang hal itu.

3) “Polisi Cepek” yang tidak taat akan aturan serta pribadi pengendara kendaraan bermotor yang masih membutuhkan “Polisi Cepek” untuk mengatur lalu lintas

Penegakan hukum erat kaitannya dengan masyarakat sebagai subjek lain dalam upaya penegakan hukum. Dalam hal ini sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting. Sikap masyarakat yaitu “Polisi Cepek” sebagai pelanggar perda menunjukkan akan sikap yang tidak taat akan aturan yang ada. Hal tersebut karena berdasarkan hasil wawancara terhadap dua “Polisi Cepek” di Kota Surabaya yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya aturan mengenai larangan mengatur lalu lintas tanpa memiliki kewenangan. Hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian “Polisi Cepek” terhadap aturan yang ada.

Keberadaan “Polisi Cepek” sendiri juga berkaitan erat dengan sikap dari masyarakat yaitu pengendara kendaraan bermotor sendiri yang memiliki disiplin berlalu lintas yang rendah. Hal tersebut kemudian menimbulkan keadaan jalan yang tidak kondusif, serta secara bersamaan dibutuhkanlah bantuan dari seorang “Polisi Cepek” yang dapat mengatur lalu lintas. Sikap masyarakat yang masih membutuhkan peran “Polisi Cepek” menjadi berlawanan dengan peraturan yang ada. Hingga saat ini, terdapat pro dan kontra dari masyarakat dalam hal ini adalah pengendara kendaraan bermotor terhadap adanya “Polisi Cepek”, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan dua pengendara di Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya, dapat diambil kesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya, hanya dilakukan dengan cara-cara humanis yaitu tidak memberikan teguran lisan dan atau penertiban kepada “Polisi Cepek, melainkan hanya melakukan penertiban kepada “Polisi Cepek” yang dianggap meresahkan pengendara berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya antara lain adalah karena ketidakjelasan aturan yang mengatur tentang pengklasifikasian sanksi terhadap “Polisi Cepek” yang dalam hal ini adalah sanksi administrasi atau sanksi pidana; penegak hukum yang tidak secara tegas menerapkan sanksi kepada “Polisi Cepek”; dan “Polisi

Cepek” sendiri yang tidak mematuhi aturan yang ada serta pribadi masyarakat yaitu pengendara kendaraan bermotor yang cenderung membutuhkan bantuan “Polisi Cepek” untuk membantu mengatur lalu lintas.

Saran

Ditujukan kepada Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya agar pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau penertiban agar sebaiknya tetap dilakukan pada saat melakukan patroli. Hal tersebut tidak semata-merta langsung menertibkan secara paksa, melainkan dengan diberikan teguran diharapkan “Polisi Cepek” mengerti bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar aturan tentang ketertiban umum Kota Surabaya. Selain itu agar Satpol PP maupun dinas perhubungan lebih gencar untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada “Polisi Cepek” dalam bentuk apapun, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Hal itu akan sedikit demi sedikit dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, demi untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di Kota Surabaya

Ditujukan kepada Polantas Kota Surabaya agar melakukan penambahan personel oleh Polisi Lalu Lintas maupun untuk mengatur lalu lintas pada wilayah dan waktu tertentu, sehingga kondisi jalan menjadi lebih tertib dan masyarakat tidak memiliki ketergantungan kepada “Polisi Cepek”, terlebih apabila untuk melanggar aturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az, Lukman Santoso. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Barama, Michael. 2016. “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22 (5)
- Chrystina Katarina, Mathilda. 2018 . “Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada Atau Tidak Adanya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi”. *USU Law Journal*. Vol. 6 (5)
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 2019. *Visi dan Misi*. (ONLINE)
(<http://dishub.surabaya.go.id/webdishub5427/>) diakses 9 April 2019)

- Fadlli, M. Luqman. 2013. *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pembentukan Peraturan BPK*. Skripsi diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.
- Fajar, Mukti ND. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Muhammad. 2008. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 (2)
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education
- INRIX. 2017. *Global Traffic Scorecard*. (ONLINE), (<http://inrix.com/scorecard/>), diakses 28 November 2018)
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. 2001. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UIL.
- M. Hadjon, Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- NAM Sihombing, Eka. 2014. *Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. (ONLINE), (<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2336-asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>), diakses 29 November 2018)
- Pemerintah Kota Surabaya. 2016. *Profil Kota Surabaya 2016*. (ONLINE), (<http://surabaya.go.id/id/page/0/17683/profil-kota-surabaya>), diakses 28 November 2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 15
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rakhmat, Muhamad. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- R, Mukhlis. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 (1)
- Satpol PP Kota Surabaya. 2019. *Visi dan Misi*. (ONLINE), (<http://satpolpp.surabaya.go.id/>), diakses 9 April 2019)
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suaib. 2017. "Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah". *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 (7)
- Suharjono, Muhammad. 2014. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 (19)
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. "Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean". *Mimbar Hukum*, Vol. 28 (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Zainuddin. 2018. *Surabaya Kekurangan 7.339 Personel Polisi, Begini Penjelasannya*, (ONLINE), (<http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/19/surabaya-kurangan-polisi-7339-personel-begini-penjelasan>, diakses 28 November 2018)



UNESA
Universitas Negeri Surabaya